

# Proceeding

## Internasional Seminar

**Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan  
dan Program Pendidikan Dalam Konteks Penguatan  
Daya Saing Lulusan**

Selasa, 15-16 November 2016  
Gedung Achmad Sanusi  
Universitas Pendidikan Indonesia

**Editor:**  
Sapriya  
Syaifullah  
Susan Fitriasari  
Leni Anggraeni  
Dede Iswandi  
Dwi Iman Muthaqin  
Diana Noor Anggraini  
Riyan Yudistira



**LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**Prosiding Seminar Internasional**

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bidang Keilmuan dan Program Pendidikan  
Dalam Konteks Penguatan Daya Saing Lulusan

**ISBN 978-602-8418-28-7**

**Editor:**

Sapriya

Syaifullah

Susan Fitriani

Leni Anggraeni

Dede Iswandi

Dwi Iman Muthaqin

Diana Noor Anggraini

Riyan Yudistira

**Penerbit**

Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung

52	LITERASI WARGA NEGARA MUDA UNTUK PENGEMBANGAN <i>CIVIC ENGAGEMENT</i> DI ABAD 21 Iqbal Arpanudin	367
53	IDENTIFIKASI KEBUTUHAN KUALIFIKASI DOSEN MATA KULIAH DASAR UMUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP ANDRAGOGI DALAM PENGUATAN KARAKTER BUDAYA POLITIK MAHASISWA Fatahillah	376
54	STRATEGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA KEWARGANEGARAAN DI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Catur Yunianto	386
55	KEWARGAAN DIGITAL, PENGUATAN WAWASAN GLOBAL WARGA NEGARA, DAN PERAN PPKN Dikdik Baehaqi Arif, Syifa Siti Aulia	393
56	URGENSI MATERI DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK PADA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR Asep Mahpudz	399
57	LIVING VALUES EDUCATION DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Kokom Komalasari	413
58	KELAS PEMILU SEBAGAI <i>BEST PRACTICES</i> PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN: UPAYA MEMBENTUK RASIONALISASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU Al Rafni dan Suryanef	422
59	PENGEMBANGAN PENILAIAN AUTENTIK BERBASIS KARAKTER PADA RANAH KETERAMPILAN Deny Setiawan, M. Ridha Syafii Damanik	430
60	INOVASI MODEL PEMBELAJARAN JERAT PALANG PADA MATA PELAJARAN PPKn DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SISWA E. Maria Ulfah, Iim Siti Masyitoh, Riyan Yudistira	437
61	AKTUALISASI LULUSAN PKN DALAM MENYONGSONG GENERASI EMAS 2045 Shilmy Purnama, Tia Athiyyah	447
62	PERPEKTIF KKN TERHADAP CP PRODI PPKn-FKIP UT Syaiful Mikdar, Sri Sumiyati	455
63	PROSES PEMBELAJARAN PKN DALAM MENINGKATKAN KREATIVITAS PESERTA DIDIK MELALUI <i>PROBLEM SOLVING</i> DI SMAN 1 PROBOLINGGO Abdul Basit	460
64	PENGEMBANGAN NILAI KEPEDULIAN WARGA NEGARA MELALUI GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN Reihana Samya Anugrawati, Prof. Dr. H. Endang Danial Ar, M.Pd.	467
65	OTONOMI PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBEKALI KEAHLIAN LULUSAN PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG Novitasari, S.Pd., Ana Mentari, S.Pd.	477
66	REVITALIZING CIVIC EDUCATION AS A MODE OF PLANTING THE VALUES OF PANCASILA Siti Tiara Maulia, S.Pd, Abdinur Batubara, S.Pd	486
67	PEMBINAAN KESADARAN WARGA NEGARA UNTUK MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP ( <i>THE LIVING ENVIRONMENT</i> ) PADA MASYARAKAT ADAT Wina Nurhayati Praja	492



# LITERASI WARGA NEGARA MUDA UNTUK PENGEMBANGAN CIVIC ENGAGEMENT DI ABAD 21

Iqbal Arpanudin

arpanudin@uny.ac.id

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta

## ABSTRACT

The aimed of this article are prepared young citizen at the 21<sup>st</sup> century. Its important caused in globalization, young citizen must have civic literacy as understanding the functions, levels and processes of government and exercising the rights and responsibilities of citizenship to re-enforce engagement such as the motivation, disposition and willingness to exercise the rights of citizenship and get involved in civic activities of citizenship in 21<sup>st</sup> centuries. Civic Education is important among literacy and engagement of young citizen. Finally, young citizen particularly in Indonesia citizen have the new competencies and the model of 21<sup>st</sup> century citizenship is informed, engaged and active citizen for achieving citizenship readiness with 21<sup>st</sup> century skills.

*Keywords: civic literacy, young citizen, civic engagement*

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mempersiapkan warga negara muda di abad 21. Hal ini penting pengaruh globalisasi sehingga warga negara muda harus memiliki civic literacy seperti memahami fungsi dan proses di semua level pemerintah, hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk memperkuat keterlibatan warga negara seperti motivasi, disposisi dan kemauan untuk terlibat dalam aktivitas kewarganegaraan di abad 21. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting untuk membelajarkan civic literacy dan civic engagement warga negara. Akhirnya, warga negara muda di Indonesia memiliki kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan di abad 21 seperti warga negara yang cerdas, warga negara yang terlibat dalam kegiatan masyarakat lokal, regional maupun global untuk mencapai kesiapan kemampuan warga negara di abad 21.

*Kata Kunci: civic literacy, warganegara muda, civic engagement*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dewasa ini begitu pesat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Dampaknya juga dirasakan dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Pergeseran yang terjadi misalnya beberapa waktu belakangan ini terjadi perubahan mengenai penggunaan media informasi dan juga pencarian referensi. Tren membaca buku cetak, majalah cetak dan media lainnya tampak tergantikan dengan media *online*. Berdasarkan pengamatan, warga negara muda saat ini lebih senang dengan mencari referensi *online* daripada mendatangi perpustakaan. Di satu sisi, kondisi demikian cukup menarik perhatian

bahwa saat ini telah begitu banyak kemudahan akses informasi yang tanpa batas. Hal ini diperkuat pendapat Maksin (2015) bahwa di abad ke 20 pengunjung perpustakaan yang mencari referensi berupa kamus, ensiklopedia dan hal lain yang dibutuhkan di perpustakaan, namun sekarang mereka melewati perpustakaan dan lebih menggunakan email, membaca sekilas di Wikipedia atau *chatting online* dengan pustakawan. Kondisi demikian menurut Maksin menyebabkan buku-buku dan ensiklopedia cetak di perpustakaan dan menjadi berdebu.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pengembangan literasi



warganegara muda abad 21 lebih difokuskan pada penyiapan warga negara muda yang memiliki wawasan global sebagaimana disebutkan McIntosh (Rapoport, 2005) bahwa warga global memiliki kebiasaan berpikir, hati, tubuh dan jiwa yang mampu untuk bekerja dan mempersiapkan hubungan dan koneksi melintasi perbedaan dan keunikannya, sekaligus menjaga dan memperdalam rasa identitas dan integritas sendiri.

Tantangan penyiapan warga negara muda sebagai warga negara untuk bersaing saat ini haruslah mulai diarahkan pada penyiapan mereka tidak hanya untuk bersaing secara lokal dan nasional, namun harus mampu secara internasional bersaing. Oleh karena itu literasi warga negara muda dikembangkan untuk menyiapkan mereka ke arah yang diharapkan di atas.

Dunia digital saat ini membawa dampak yang luar biasa mengubah pola dalam pergaulan. Kekuatan media sosial misalnya berpengaruh terhadap partisipasi warganegara muda dalam bidang partisipasi di Amerika. Hasil survey *McArthur Foundation Research Network on Participatory Politic* bahwa 41% pemuda berusia 15 hingga 25 tahun telah berpartisipasi dalam kelompok politik baru secara online, menulis dan menyebarkan blog tentang isu politik dan video politik di media sosial mereka (Kahne & Middaugh, 2012). Hal ini menunjukkan kekuatan media sosial *online* mempengaruhi partisipasi politik warga negara muda. Kondisi tersebut diperkuat oleh penelitian Martens & Hobbs (2015, p. 120) bahwa “...students in a selective-admission media literacy program have substantially higher levels of media knowledge and news and advertising analysis skills than other students. Participation in a media literacy program was positively associated with information-seeking motives, media knowledge, and news analysis skills. Moreover, information-seeking motives, media knowledge, and news analysis skills independently contributed to adolescents’ intent toward civic engagement”

Artinya bahwa ada hubungan antara literasi media dengan peningkatan pengetahuan dan *civic engagement* warga negara muda dan berkontribusi terhadap *civic engagement* mereka ketika dewasa.

## PEMBAHASAN

### Literasi Warga Negara Abad 21

*Van Roekel* sebagai presiden NEA berkata “*The 21st century isn’t coming; it’s already here*” (National Education Association, 2010). Artinya sebagai warga dari dunia tidak bisa mengelak akan derasnya perubahan yang terjadi dan terus berubah. Abad 21 ditandai dengan semakin mudahnya batas-batas negara bangsa menjadi warga masyarakat dunia dalam satu tatanan kehidupan yang terbuka. Gaya hidup yang menyangkut pilihan pekerjaan, kesibukan, makanan, mode pakaian, dan kesenangan telah mengalami perubahan, dengan kepastian mengalirnya pengaruh kota-kota besar terhadap kota-kota kecil, bahkan sampai ke desa. Bentuk-bentuk tradisional bergeser, diganti dengan gaya hidup global. Kesenangan bergaya hidup internasional mulai melanda. Sebagai warga negara muda memiliki peran sebagai pemimpin pada sepuluh dan dua puluh tahun mendatang. Oleh karena itu ketika menjadi warga negara muda diperlukan berbagai upaya dari berbagai stakeholder untuk mempersiapkannya. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan *civic literacy* (kemelekakan warga) untuk penguatan *civic engagement* (keterlibatan warga) di abad 21.

Sebelum lebih jauh membahas *civic literacy* dan *engagement* warga negara muda, sedikit dibahas mengenai warga negara adalah warga negara lazim dimaknai sebagai anggota dari sebuah komunitas politik atau negara yang dikaruniai satu rangkaian hak dan kewajiban (Kalidjernih, 2011, p. 9). Hak dan kewajiban menjadikan warga negara harus aktif sebagai warga negara dan berkontribusi terhadap negara.

Selanjutnya warga negara muda diambil dari kata *youth* dalam Bahasa Inggris yang berarti pemuda yang berada pada rentang usia tertentu. *Youth* di Inggris berada pada rentang usia 14-19 tahun. Kebijakan pada awal abad ini menjelaskan bahwa pemuda (*young people*) memiliki potensi, kekuatan dan inklusi (terbuka untuk semua) sehingga ketika mereka diberdayakan akan memberikan manfaat, mereka merasa didukung dan dipercaya untuk membuat keputusan dalam masyarakat (Collin, 2015).

Kenniston (Santrock, 2011) mengemukakan masa muda (*youth*) adalah



periode kesementaraan ekonomi dan pribadi, dan perjuangan antara ketertarikan pada kemandirian dan menjadi terlibat secara sosial. Dua kriteria yang diajukan untuk menunjukkan akhir masa muda dan permulaan dari masa dewasa awal adalah kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam membuat keputusan. Mungkin yang paling luas diakui sebagai tanda memasuki masa dewasa adalah ketika seseorang mendapatkan pekerjaan penuh waktu yang kurang lebih tetap (Santrock, 2011).

Apabila kedua istilah tersebut digabungkan, maka dapat ditarik pengertian dari warga negara muda adalah anggota pada rentang usia muda dari sebuah komunitas politik atau negara yang memiliki satu rangkaian hak dan kewajiban.

Mengenai keterkaitan pentingnya pendidikan Kewarganegaraan mendidik warga negara muda memiliki kemelekan di abad 21, Nussbaum (Banks, 2008) mengutarakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus membantu siswa mengembangkan identitas dan keterikatan pada komunitas global dan hubungan manusia kepada orang lain di seluruh dunia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

Warga negara yang baik setidaknya tercermin dari tiga aspek utama. Ketiga aspek itu meliputi: (1) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (2) kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*); dan (3) watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Pengetahuan kewarganegaraan antara lain berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Kecakapan kewarganegaraan dalam suatu negara dapat berupa kecakapan intelektual dan partisipatoris. Watak kewarganegaraan merupakan sifat-sifat publik dan privat utama yang dimiliki warga negara untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Lebih jauh warga negara yang dikatakan baik tidaklah hanya sebatas patuh saja namun bisa memberikan peran aktif dalam kehidupan masyarakat. Warganegara yang baik ini dapat diidentifikasi dengan pembagian sebagai berikut:

1) *Engage and participate in traditional political activities such as voting, joining political parties and being a candidate for election.*

2) *Engagement in the form of voluntary community activities. This might be working with welfare agencies such as a homeless shelter, collecting for charities or contributing to your local community clean-up.*

3) *Participating in activities and movements that seek to make changes to social and political directions. Mostly these are seen in a positive sense such as signing petitions or joining a legal demonstration on a social issue. Some may be 'negative' or illegal such as illegal demonstrations or damaging property.*

4) *Participating in self-directing, beneficial behaviors such as financial self-sufficiency and creative problem-solving such as saving water in one's home or being energy efficient.* (Print, 2013, p. 40).

Sementara itu juga, Print (Audigier, 2000; Dalton, 2008; Hoskin, Barber, Nijlen, & Villalba, 2011; Hoskins, B., & Deakin-Crick, 2010; Print, 2013) mengidentifikasi warganegara aktif dari berbagai konsep yang dijelaskan para ahli diantaranya adalah:

1) *Engagement and participation of people in their society*

2) *Participation is not only political but also about civic and civic society*

3) *Learning in school is part of a lifelong experience*

4) *Includes both active and 'passive' elements*

5) *Involves active dimensions of citizenship from skills development as well as a base of knowledge and understanding*

6) *Citizenship based on theoretical approaches from liberal, communitarian and civic republican traditions where activity ranges from individualistic and challenge driven approaches to more collective actions and approaches.*

Literasi dalam bahasa Inggris adalah *literacy* berasal dari bahasa Latin *littera* (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Literasi merupakan sarana penting komunikasi yang memungkinkan individu, masyarakat dan lembaga untuk berinteraksi, dari waktu ke waktu dan di seluruh ruang, karena mereka mengembangkan jaringan hubungan sosial melalui bahasa (Benavot, 2015, p. 273)

Dalam konteks politik, ketika literasi disandingkan dengan civic menjadi civic



*literacy* adalah pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik dan kenegaraan menjadi keniscayaan seiring dengan perubahan politik yang menuntut warga bertindak otonom (Suryadi, 2010, p. 3). Selanjutnya Benavot mengidentifikasi tujuh aspek literasi hubungan sosial (*social nexus*) diantaranya adalah:

- 1) *develop strong links with existing development policies and community priorities.* (Membangun ikatan yang kuat dengan kebijakan pembangunan yang ada dan prioritas kebutuhan masyarakat).
- 2) *inter-ministerial coordination is vital.* (koordinasi antar kementerian penting).
- 3) *government agencies include civil society organizations, NGOs and faith-based associations, in order to increase the provision of, and resources allocated to, youth and adult literacy programmes.* (lembaga-lembaga pemerintah termasuk organisasi masyarakat sipil, LSM dan asosiasi keagamaan (keimanan) dalam rangka meningkatkan penyediaan, sumber daya yang dialokasikan untuk program literasi pemuda dan orang dewasa).
- 4) *enriched when literacy policies emphasize the interdependence of literacy activities across the life course.* (diperkaya ketika kebijakan literasi menekankan pada interdependensi dari aktivitas literasi di seluruh jalan kehidupan).
- 5) *literacy enables individuals to acquire livelihood skills which improve their employability and productivity.* (literasi memungkinkan individu untuk memperoleh keterampilan mata pencaharian yang meningkatkan kerja dan produktivitas mereka).
- 6) *a vibrant literacy nexus strengthens inter-generational literacy connections.* (relasi literasi memperkuat hubungan literasi antar generasi).
- 7) *Finally, a dynamic literacy nexus integrates the public and private spheres of an individual's life with each other.* (akhirnya, relasi literasi yang dinamis mengintegrasikan ruang publik dan swasta dari kehidupan individu satu sama lain).

Dari ketujuh aspek yang dikembangkan Benavot di atas, setidaknya harus ada keterkaitan hubungan antara kebijakan pembangunan (pendidikan) dengan kebutuhan masyarakat termasuk peran-peran lembaga

pemerintah, NGO dan lembaga keagamaan serta literasi individu yang memperkuat produktivitas dan keterampilan kerja di masa depannya. Dengan kata lain literasi seorang warga negara muda adalah untuk mempersiapkan dirinya hidup dan terlibat dalam ruang sosial yang heterogen sehingga mampu bertahan dalam mengarunginya.

Literasi warga negara pada abad 21 diidentifikasi memiliki beberapa macam ciri yang harus dimiliki oleh warga negara muda yaitu:

- 1) Warga yang aktif dan berpartisipasi efektif dalam pemerintahan (politik).
- 2) Melaksanakan hak dan kewajiban kewarganegaraan di tingkat lokal, nasional dan global
- 3) Memahami implikasi lokal dan global dari keputusan masyarakat
- 4) Menerapkan keterampilan abad ke-21 untuk membuat pilihan cerdas sebagai warga negara
- 5) Mahir dalam akademik dan pengetahuan interdisipliner, literasi lingkungan seperti; keuangan, ekonomi, bisnis dan literasi kewirausahaan; dan kesadaran akan kesehatan,
- 6) Memiliki kompetensi global dan keterampilan abad 21,
- 7) Mampu berpartisipasi dengan aman, cerdas, produktif dan bertanggung jawab dalam dunia digital (Partnership for 21st Century Skills, 2014; Salpeter, 2008).

Civic literasi ini berkaitan dan Kemelekkan warga negara ini pada akhirnya ada pemahaman warga negara dalam proses politik dan pemerintahan, lokal dan nasional yang mengerti hak dan kewajibannya dan selalu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat lokal, nasional dan internasional.

### **Civic Engagement**

*Civic engagement* dapat didefinisikan sebagai partisipasi publik. Definisi yang dimaksud adalah adanya kerja sama dalam masyarakat melalui hubungan secara keseharian maupun formal (Mujahidah, 2015). Dalam keseharian diantaranya adalah interaksi dengan komunitas di lingkungan rumah dengan tetangga, dan *civic engagement* formal terjadi dalam suatu organisasi yang resmi. *Civic engagement* dapat terbagi menjadi *intra-communal engagement* yang terjadi antar



anggota dalam satu kelompok dan *inter-communal engagement* yang terjadi antar anggota dalam kelompok yang berbeda (Varshney, 2002).

Keterlibatan warga negara yang dipaparkan Varshney adalah keterlibatan aktif bukan dalam hal hubungan kenegaraan, namun lebih pada keterlibatan sosial. Hal ini senada dengan pendapat Carpini (Lisman, 1998, p. 3) yang sama-sama menyoroti keterlibatan aktif warga negara pada kegiatan sosial dan isu-isu publik.

Pendapat sedikit berbeda dan lebih luas dikemukakan Ehrlich (Pancer, 2015, p. 3) bahwa "*Civic engagement means working to make a difference in the civic life of our communities and developing the combination of knowledge, skills, values and motivation to make that difference. It means promoting the quality of life in a community through both political and non-political processes*". Definisi Ehrlich di atas cakupannya adalah peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah sosial namun juga dalam politik. Berkaitan dengan politik, *civic engagement* meliputi keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam kehidupan lokal, nasional maupun global seperti voting, melek politik, dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan (Bowen, 2010). Oleh karena itu Jacoby menuturkan tidak ada definisi tunggal mengenai *civic engagement*, tergantung konteks dan tujuan penggunaannya (Ortbal & Emmerling, 2013).

Oleh karena itu Ramaley (Adler & Goggin, 2005, pp. 238-239) membaginya ke dalam empat jenis, yaitu

- 1) *Civic engagement as community service*. Bentuknya adalah berupa *voluntarist* (sukarelawan) yang memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat di sekitarnya maupun dalam skala nasional dan global.
- 2) *Civic engagement as collective action*. Ada tindakan kolektif yang dilakukan oleh warganegara dalam masyarakat.
- 3) *Civic engagement as political involvement*. Keterlibatan dalam politik warganegara dalam pemerintahan.
- 4) *Civic engagement as social change*. Sebagai partisipasi dalam perubahan sosial di masyarakat.

Namun demikian satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa poin penting adanya

keterlibatan warga negara secara sosial, politik dan kemasyarakatan serta mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Keterlibatan warga negara dalam masalah-masalah di masyarakat ini menuntut kemelekan warga negara itu sendiri. Tanpa kemelekan tersebut menjadi tidak jelas orientasi atas keterlibatannya. Terutama di abad 21 saat ini yakni menuntut warga negara untuk berpartisipasi aktif tidak hanya di lingkup lokal namun global. Oleh karena itu dibutuhkan literasi abad 21 bagi warga negara untuk memperkuatnya.

#### **Model Kewarganegaraan Abad 21**

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat belum tergantung terhadap internet. Kebanyakan masyarakat masih membaca koran cetak, siaran tv dan radio konvensional dan dalam kegiatan politik pun masih konvensional misalnya antusias menghadiri orasi politik dari partai yang didukungnya, menghadiri pertemuan rutin mingguan atau insidental.

Namun sekarang dengan kehadiran internet dan kemudahan yang diberikannya, masyarakat diberikan pilihan yang banyak akan kebutuhan informasi. Tidak hanya konvensional namun merambah pada media digital online seperti sosial media, pesan-pesan berantai yang menjadi viral tentang apapun termasuk politik. Kadangkala informasi yang disajikan tidak berdasar fakta di lapangan atau bahasa sekarang dinamakan *hoax*.

Kebutuhan dan kesempatan warga yang menjadi tren saat ini di abad 21 untuk menjawab tantangan-tantangan kemelekan dan keterlibatan warga negara diantaranya adalah *pertama*, tantangan yang signifikan dan kompleks. Tantangan tersebut membutuhkan lebih daripada pengetahuan tradisional warganegara dalam politik sebab tantangannya berbeda dengan sebelum abad 21 di mana dunia belum terdiginaslisasi. Masyarakat saat ini ditantang tidak hanya mampu terlibat dan menyelesaikan masalah lokal dan nasional, namun juga terkait isu-isu global. Tantangan lainnya adalah arus informasi yang begitu deras mengalir memuat masyarakat harus menentukan informasi mana yang dapat dipercaya dan dijadikan dasar keterlibatannya. Dari sinilah diperlukan civic literasi untuk menopang kemampuan, sikap dan nilai-nilai keterlibatannya.

*Kedua*, dunia internasional yang saling bergantung dan beragam memberikan



penghargaan kepada orang yang mengerti dan memiliki kompetensi global, seperti kemampuan berhubungan secara lokal ke global, mengakui perbedaan pandangan, berpikir kritis dan kreatif tentang tantangan global dan mampu berkolaborasi dalam forum internasional yang beragam dengan saling menghormati satu sama lain. Globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi mengubah dasar masyarakat, ekonomi dan kehidupan sosial. Masyarakat dan lingkungan kerja yang semakin beragam dari segi bahasa, budaya, warisan dan lain sebagainya. Globalisasi menuntut warga negara berwawasan global. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan didesain untuk mempersiapkan warga negara muda mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya sebagaimana Oxfam melihat *global citizen* sebagai seseorang yang *'aware of the wider world and has a sense of their own role as a world citizen; respects and values diversity; willing to act to make the world a more equitable and sustainable place; take responsibility for their actions* (Aulia, 2016; Education Above All, 2012).

Selanjutnya pandangan Samsuri (Samsuri, 2013) bahwa "persoalan-persoalan kehidupan warga negara dalam telah mengalami "globalizing" atau "globalized". Perhatian dunia yang mulai mengkaji permasalahan-permasalahan warga negara secara global menempatkan posisi pentingnya kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu posisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya literasi warga negara muda untuk memperkuat *civic engagement* menjadi penting. Berkaitan dengan hal di atas, pentingnya penyiapan warga negara muda yang mampu terlibat dalam percaturan kehidupannya diulas oleh Kerr (Winataputra & Budimansyah, 2007) yang merumuskan pendidikan Kewarganegaraan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

*Ketiga*, hubungan yang semakin erat karena dunia digital saat ini mampu memberdayakan orang mengakses informasi tanpa batas, bergabung dalam berbagai komunitas, berkontribusi secara kreatif untuk memecahkan masalah-masalah. Jaringan internet telah mengubah cara kita berhubungan satu sama lain, interaksi digital rutin dalam kehidupan sehari-hari, dan warga abad ke-21

diharapkan untuk berinteraksi tanpa kendala di ruang digital di mana warga negara muda belajar tentang isu-isu dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, ekonomi dan perubahan sosial lainnya. Dengan meningkatnya akses terhadap jaringan internet semua menjadi serba *mobile* yang memungkinkan laporan atau informasi dari masyarakat (*citizen report*) menjadi cepat diakses oleh siapapun.

Syaratnya adalah setiap orang harus menjadi warganegara digital (*digital citizenship*), yang membantu setiap orang memahami hak dan tanggung jawab mereka, mengakui manfaat dan risiko penggunaan sosial media dan menyadari akibat pada diri pribadinya serta etika di ruang digital, bertindak cerdas dan efektif dalam memanfaatkan media online digital tersebut.

Selanjutnya dimensi kewarganegaraan abad 21 yang dibahas oleh Partnership For 21<sup>st</sup> Century Skills (2014) diantaranya adalah *civic literacy*, *global citizenship* dan *digital citizenship*. Setiap orang dapat menerapkan *civic literacy*, *global engagement*, *digital citizenship* pada isu atau aktivitas kewarganegaraan. Hal ini untuk mempersiapkan warganegara muda belajar dan praktik dan juga sebagai pengakuan elemen kewarganegaraan abad 21.

Apabila dibuat dalam sebuah gambar maka hubungannya adalah:



**Model Kewarganegaraan Abad 21**  
(Partnership for 21<sup>st</sup> Century Skills, 201:12)

*Civic literacy* meliputi pengetahuan mengenai pemerintahan dan peran warganegara seperti *civic disposition*, *civic knowledge* dan partisipasi warga negara. Civic literacy ini mutlak dimiliki oleh setiap warga negara muda sebagai bekal untuk mewujudkan warga negara abad 21 ini.



*Digital citizenship* meliputi warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam dunia digital saat ini, berperan serta dalam dunia tersebut dan bertanggung-jawab atas pilihannya dalam dunia maya tersebut. Secara lebih singkat, Mossberger, Tolbert, & McNeal (2008, p. 1) mengutarakan "*digital citizenship is the ability to participate in society online*". Ini berarti bahwa kemelekkan terhadap dunia online menjadikan modal yang sangat penting dalam pergaulan warga negara muda dalam dunia digital saat ini.

*Global engagement* meliputi kompetensi global sebagai warga negara dan berkontribusi serta terlibat dalam isu-isu global. Untuk mampu terlibat dalam dunia internasional diperlukan setidaknya kemampuan berbahasa asing, memahami identitas dan budaya nasional memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam lingkup regional maupun internasional. Kompetensi global yang diharapkan ada pada setiap warga negara muda dirumuskan oleh Boix Mansilla & Bughin, (2011, p. 97)

- 1) *Investigate the world beyond their immediate environment, framing significant problems and conducting well-crafted and age-appropriate research.*
- 2) *Recognize perspectives, others' and their own, articulating and explaining such perspectives thoughtfully and respectfully.*
- 3) *Communicate ideas effectively with diverse audiences, bridging geographic, linguistic, ideological, and cultural barriers.*
- 4) *Take action to improve conditions, viewing themselves as players in the world and participating reflectively.*

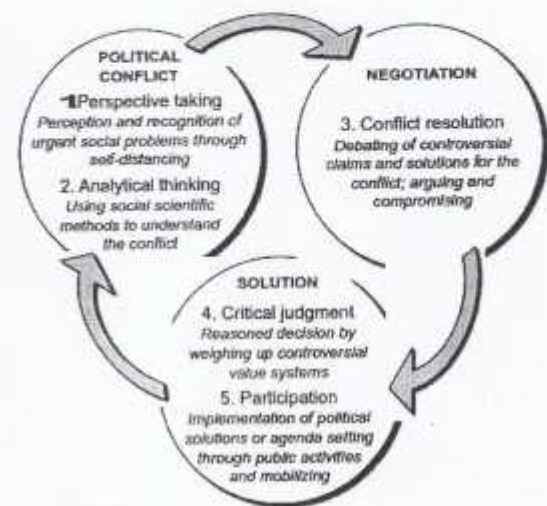
Pada akhirnya ketiga kombinasi di atas menghasilkan warga negara yang mencerahkan, terlibat dan aktif sehingga mampu dan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dan berkolaborasi dengan orang lain diluar komunitasnya.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga dunia (*global society*).

Pada akhirnya warga negara pada abad 21 ini harus memiliki apa yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk membantu orang-orang muda memperoleh dan belajar untuk menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab sepanjang hidup mereka. Warga negara yang diharapkan diantaranya adalah:

- 1) Mampu menampilkan pengetahuannya dan bijaksana, memiliki pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu publik dan masyarakat, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan juga mampu berdialog dengan kelompok yang memiliki perspektif berbeda.
- 2) Mampu berpartisipasi dalam komunitas keanggotaan suatu organisasi yang bekerja untuk mengatasi masalah dan berbagai kepentingan budaya, sosial, politik, dan agama.
- 3) Memiliki keterampilan berpolitik, seperti ikut pemilu, berdemonstrasi, petisi, dan lain sebagainya
- 4) Memiliki kebajikan nilai dan moral warga negara yang memiliki kepedulian terhadap hak-hak dan kesejahteraan orang lain, tanggung jawab sosial, toleransi dan rasa hormat.

Lebih lanjut Petrick menggambarkan lima konsep warganegara yang aktif, *informed* dan *engagement* sebagai berikut:



Lima Konsep Warga Negara Aktif (Petrick, 2013)



Dalam konteks Indonesia, warga negara muda Indonesia yang berjiwa Pancasila harus memiliki wawasan global, karena dalam prinsip kemanusiaan (*humanity*) yang ada pada sila kedua Pancasila mengandung dimensi yang dapat membuat warga negara Indonesia memiliki wawasan global (Murdiono et al., 2014).

## SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan berperan peranan penting mempersiapkan warganegara muda di abad 21. Warga negara yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 untuk bisa hidup bermasyarakat di tingkat lokal, nasional dan global. *Civic engagement* yang menjadi faktor penting eksistensi dan keaktifan warganegara muda harus diiringi dengan civic literacy (kemelekan warganegara) seperti menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab sepanjang hidup mereka di abad ini. Keterlibatan warga negara muda harus diiringi dengan kemelekan warga negara yang efektif.

Dengan kompetensi yang dimiliki warga negara muda berguna untuk membekali dirinya hidup dalam lingkup lokal, nasional maupun global. Mereka mampu memberikan peran yang aktif yang diperlukan dalam dunia yang semakin digital. Warganegara muda yang diharapkan adalah mampu menampilkan pengetahuannya dan bijaksana, memiliki pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu publik dan masyarakat, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan juga mampu berdialog dengan kelompok yang memiliki perspektif berbeda. Mampu berpartisipasi dalam komunitas keanggotaan suatu organisasi yang bekerja untuk mengatasi masalah dan berbagai kepentingan budaya, sosial, politik, dan agama. Memiliki keterampilan berpolitik, seperti ikut pemilu, berdemonstrasi, petisi, dan lain sebagainya. Memiliki kebajikan nilai dan moral warga negara yang memiliki kepedulian terhadap hak-hak dan kesejahteraan orang lain, tanggung jawab sosial, toleransi dan rasa hormat.

Tantangan di abad 21 ini tersebut harus dijawab oleh pembuat kebijakan pendidikan terutama Pendidikan Kewarganegaraan untuk menyiapkan warga negara yang diharapkan mampu untuk bersaing dengan tren saat ini

dengan tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa dan warga negara Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adler, R. P., & Goggin, J. (2005). What Do We Mean By "Civic Engagement"? *Journal Of Transformative Education*, 3(3), 236–253.
- Audigier, F. (2000). *Basic Concepts And Core Competencies For Education For Democratic Citizenship*. Strasbourg: Council Of Europe.
- Aulia, S. S. (2016). Pembentukan Wawasan Global Masiswa Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di FKIP Universitas Ahmad Dahlan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1), 66–81.
- Banks, James A. (2008). Diversity, Group Identity, And Citizenship Education In A Global Age. *Educational Research*, 37(3), 129–139.
- Benavot, A. (2015). Literacy In The 21st Century: Towards A Dynamic Nexus Of Social Relations. *International Review Of Education*, 61(3), 273–294.
- Boix Mansilla, V., & Bughin, J. (2011). *Preparing Our Youth To Engage The World*. (E. Omerso, Ed.), *Educating For Global Competence*. New York: Asia Society.
- Bowen, G. (2010). *Civic Engagement In Higher Education. Resources And References*. Center For Service Learning Western Carolina University. Cullowhee, NC.
- Collin, P. (2015). *Young Citizens And Political Participation In A Digital Society*. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Dalton, R. (2008). *The Good Citizen: How A Younger Generation Is Reshaping American Politics*. Washinton DC: CQ Press.
- Education Above All. (2012). *Education For Global Citizenship. Childhood Education*. Doha Qatar: Education Above Al.
- Hoskin, B. L., Barber, C., Nijlen, D. Van, & Villalba, E. (2011). Comparing Civic Competence Among European Youth: Composite And Domain-Specific Indicators Using IEA Civic Education Study Data. *Comparative Educational*



- Review*, 55(1), 82–110.
- Hoskins, B.L., & Deakin-Crick, R. (2010). Competences For Learning To Learn And Active Citizenship: Different Currencies Or Two Sides Of The Same Coin? *European Journal Of Education*, 45(1), Part II.
- Kahne, J. ., & Middaugh, E. (2012). Digital Media Shapes Youth Participation In Politics. *Phi Delta Kappan*, 94(3), 52–56.
- Kalidjernih, F. K. (2011). *Pusparagam Konsep Dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara.
- Lisman, C. D. (1998). *Toward A Civil Society: Civic Literacy And Service Learning*. Westpot: Bergin & Garvey Publisher.
- Maksin, M. (2015). From Ready Reference To Research Conversations. The Role Of Instruction In Academic Reference Service. In J. Bowers & C. Forbes (Eds.), *Rethinking Reference For Academic Libraries: Innovative Developments And Future Trends*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
- Martens, H., & Hobbs, R. (2015). How Media Literacy Supports Civic Engagement In A Digital Age. *Atlantic Journal Of Communication*, 23(2), 120–137.
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & Mcneal, R. S. (2008). *Digital Citizenship. The Internet, Society, And Participation*. Cambridge, Massachusetts London, England: The MIT Press.
- Mujahidah, A. (2015). Eksistensi Civic Engagement Dan Elite Integration Dalam Konflik Sunni-Syiah. *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama Elite*, 5(2), 139–166.
- Murdiono, M., Wahab, A. A., Maftuh, B., Ilmu, F., Universitas, S., Yogyakarta, N., ... Indonesia, U. P. (2014). Building A Global Perspective Of Young Citizens Having. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(2), 148–159.
- National Education Association. (2010). *Global Competence Is A 21st Century Imperative*. Washinton DC. Retrieved From [http://www.nea.org/assets/docs/he/pb28a\\_global\\_competence11.pdf](http://www.nea.org/assets/docs/he/pb28a_global_competence11.pdf)
- Ortbal, K., & Emmerling, G. (2013). Civic Engagement In Higher Education: Concepts And Practices. (Book Review). *Journal Of Higher Education Outreach And Engagement*, 17(1), 137–142.
- Pancer, S. M. (2015). *The Psychology Of Citizenship And Civic Engagement*. Oxford: Oxford University Press.
- Partnership For 21st Century Skills. (2014). *Reimagining Citizenship For The 21st Century: A Call To Action For Policymakers And Educators*, 1–24. Retrieved From [http://www.p21.org/storage/documents/reimagining\\_citizenship\\_for\\_21st\\_century\\_webversion.pdf](http://www.p21.org/storage/documents/reimagining_citizenship_for_21st_century_webversion.pdf)
- Petrick, A. (2013). Learning “How Society Is And Might And Should Be Arranged.” In M. Print & D. Lange (Eds.), *Civic Education And Competences For Engaging Citizens In Democracies*. Rotterdam, Boston, Taipe: Sense Publisher.
- Print, M. (2013). Competencies For Democratic Citizenship In Europe. In M. Print & D. Lange (Eds.), *Civic Education And Competences For Engaging Citizens In Democracies* (Pp. 37–50). Rotterdam, Boston, Taipe: Sense Publisher.
- Rapoport, A. (2005). A Forgotten Concept: Global Citizenship Education And State Social Studies Standards. *The Journal Of Social Research*, 33(1), 91–113.
- Salpeter, J. (2008). 21st Century Skills: Will Our Students Be Prepared? Retrieved January 1, 2016, From <http://www.techlearning.com/article/13832%0alearning>
- Samsuri. (2013). Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum 2013, (September), 1–11.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development*. New York: The Mcgraw-Hill Companies, Inc.
- Suryadi, K. (2010). *Inovasi Nilai Dan Fungsi Komunikasi Partai Politik Bagi Penguatan Civic Literacy*. Pidato Penguatan Jabatan Guru Besat Ilmu Komunikasi Politik. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict And Civil Life: Hindus And Muslims In India*. Yale: Yale University Press.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar, Dan Kultur Kelas*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.